



HEGEMONI KIAI TERHADAP DEMOKRATISASI DI PESANTREN: Analisis Bahasa Tutar Pengasuh PP Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang

Muhammad Madarik (mmadarik@alqolam.ac.id)

Hairul Puadi (hairulpuadi@alqolam.ac.id)

Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Juni 2019 / Revised: Agustus 2019 / Accepted: September 2019)

ABSTRACT

This research tries to uncover kiai's hegemony based on the perspective of language which is correlated with the discourse of democratic values. Gramsci's hegemony is used as the basis for analyzing word structures in the context of the territory of a pesantren caregiver, to dissect the level of kiai's intervention on the sustainability of democratization through his utterances. The context of power uses Foucault's assertion, that the pattern of power relations cannot be conceptualized as belonging to an individual or class. Therefore, the author tries to distill the level of democracy from the power relations of the kiai at pesantren Raudlatu Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang through the texture perspective of his expressions.

The method used is Qualitative research. This type of research uses methods of observation, interviews and documentation. In analyzing the data, the researcher uses the following steps: Field notes are reduced in categories. The results are presented for each category. Analysis of the language of caregivers in this paper is limited to two aspects: First, things that are nuanced politically. Second, matters relating to policies within the scope of pesantren.

Keywords: Pesantren, caregivers, hegemony, Gramsci, democratization

1. PENDAHULUAN

Meminjam istilah Aminoto Sa'dullah, pesantren dan dunianya merupakan sebuah “kotak ajaib”, karena kehadirannya senantiasa masih aktual untuk diperdebatkan dan selalu saja menyingkakan perihal “misterius” bagi kalangan para peneliti dan kaum akademisi.¹ Pesantren dinilai berada dalam lingkaran misteri, karena dunia kaum sarungan itu tetap eksis dengan tetap memegang nilai-nilai dan tradisi salaf. Padahal jika dihadapkan dengan modernitas yang melaju kian cepat, maka eksistensi demikian begitu rigid. Anehnya, anggapan sebagian kelompok mengenai kejumudan pesantren tidak seratus persen benar. Buktinya hingga kini, pesantren menyimpan potensi besar dalam hal proses-proses transformasi ilmu pengetahuan, penguatan pemahaman dan perilaku keagamaan dan pengokohan kemandirian.

Salah satu tema besar yang seringkali digulirkan kelompok akademisi adalah persoalan dialektika dunia pesantren dengan wacana demokrasi. Hal ini tentu bisa disadari, sebab pesantren merupakan tipologi (*prototype*) lembaga pendidikan Islam yang benar-benar tumbuh (*original*) di tanah nusantara yang sementara ini dijadikan sebagai kiblat yang merepresentasi golongan “muslim tradisional” di Indonesia. Oleh karenanya, corak demokrasi dan demokratisasi perspektif Indonesia dapat diwakili oleh lembaga pendidikan Islam yang bernama “Pesantren”.

Pada dasarnya, nilai-nilai dan tradisi demokrasi di sebagian besar pesantren telah muncul sejalan dengan tumbuhnya pesantren itu sendiri. Bahkan A.S. Hikam sebagaimana diistilahkan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengungkapkan bahwa dunia pesantren merupakan sub-kultur bagi potensi berkembangnya masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia.² Tesis ini bukan tanpa alasan, karena menurut Hikam pesantren adalah sebuah gerakan balik perimbangan (*counter balancing*) terhadap negara.

Dinamika yang dimunculkan oleh pesantren merupakan sebuah keberlanjutan dari tradisi besar (*great tradition*) untuk mentranmisikan Islam tradisional yang bersumbu dari teks-teks kitab klasik.³ Pesantren juga dianggap suatu representasi yang otoritatif untuk membidik kaum abangan, mengingat Islam dalam bentuk

¹ Lihat penelitian Sholahuddin, *Hegemoni Kiai Terhadap Proses Demokratisasi Santri di Pondok Pesantren Darun Najah Karang Ploso Ngijo Malang*, 2002

² Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hlm. 97

³ Ibid, hlm. 79.

yang diusung kalangan pesantren ini merupakan varian terbesar umat Islam di Indonesia, di samping munculnya tipe Islam modernis, dan fundamentalis yang juga tumbuh subur di wilayah republik ini.⁴

Fenomena yang menggambarkan bahwa pesantren merupakan kawah candradimuka proses-proses demokrasi dapat diperjelas dari contoh tamsil: Adanya kebiasaan para santri memahami dan mendalami kitab kuning dengan cara musyawarah. Tradisi adu argumentasi (*munadzarah*) yang disinyalir bagian hasil cangkokan era keemasan Islam abad pertengahan hijriyah itu memang menyuguhkan pemandangan yang menyisakan kesan kuat bahwa perbedaan pendapat dan anggapan sebuah kebenaran tidak berdiri tunggal. Model pembelajaran semacam ini di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya cara mengeksplorasi hukum-hukum fiqh Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum bahsul masail.

Kenyataan-kenyataan di atas seringkali luput dari observasi mendalam para peneliti tentang pesantren, sehingga kadangkala mereka terlalu gegabah menarik benang merah berkenaan dengan demokratisasi di dalam pagar pesantren. Meskipun harus diakui bahwa relasi kiai-santri cenderung didominasi oleh sikap yang terbungkus “takdzim” dan “berkah” merupakan poros yang dibidik oleh orang-orang luar pesantren sebagai pemasungan terhadap demokratisasi. Bentuk hubungan kiai-santri semacam ini, seperti dituturkan Nurcholish Madjid, merupakan tekanan pada hal yang lebih terasa bernilai mistik.⁵ Tetapi secara umum, apapun respon kalangan non pesantren terhadap situasi dan kondisi lingkungan pesantren, secara keilmuan tidak banyak memberikan dampak yang signifikan kepada patriotisme para santri kepada almamaternya.

Hal penting dari eksistensi pesantren adalah salah satu unsur sentral dalam sistem pesantren ialah keberadaan Kiai di tengah-tengah pesantrennya. Di samping karena ia merupakan pendiri dan pengasuh, seorang kiai dianggap pemegang hak yang abash. Oleh sebab itulah, Zamakhsyari Dhofier menyebut sosok kiai senantiasa menjadi referensi dan rujukan utama bagi para santri.⁶ Posisi ini berlaku di dalam setiap aspek kehidupan yang berlangsung di lingkungan pesantren yang diasuhnya. Dari perspektif inilah, dominasi kuat seorang kiai benar-benar

⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 7.

⁵ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), hlm. 26.

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Sebuah Penelitian Authobiography Kiai*, (Jakarta: LP3M, 1985), hlm. 15.

mewarnai semua segi kultur hidup dunia pesantren. Fenomena ini wajar saja, karena wujud pesantren merupakan investasi pribadinya. Sisi lain, para santri memandang bahwa kepatuhan serta pengagungan (*takdzim*) merupakan perilaku yang harus disikapi dengan kata “diterima begitu saja” (*taken for granted*) yang tidak boleh tawar kembali. Dari keberadaan sosok sang kiai yang sedemikian rupa, secara tidak sadar telah ikut serta mengkonstruksi bangunan hegemoni kiai yang begitu kokoh di tengah-tengah pesantrennya.

Penelitian ini mencoba menguak fakta-fakta hegemoni kiai dengan berpijak dari sudut pandang bahasa yang dikorelasikan dengan wacana nilai-nilai demokrasi. berlandaskan dari apa yang dikatakan seorang filsuf Jerman, Meinong bahwa setiap tutur yang bermakna di dalam kalimat tentulah mempunyai acuan (*referent*). Jika tidak, maka tutur itu tidak akan bermakna, sehingga istilah itu pasti punya benda acuannya. Kalau benda acuan tidak terlihat, maka dengan cara keberadaan yang lain.⁷ Meminjam gagasan Locke mengenai “akal budi” yang amini oleh Whitehead bahwa “akal budi” merupakan suatu kesatuan yang muncul dari proses menyerap dan mengolah secara aktif berbagai ide.⁸

Beranjak dari dua ahli filsafat ini sebagai sebuah landasan pendekatan (*foundation approach*), maka penulis menemukan keberanian untuk mengeksplorasi tingkat demokrasi melalui ujaran-ujaran Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang. Bagi penulis, bahasa merupakan kajian mempunyai kemungkinan-kemungkinan dimaknai dari berbagai sudut pandang (*opportunities are interpreted from various perspectives*), maka tafsir ungkapan-ungkapan Pengasuh pesantren tersebut berada di ujung interpretasi penulis.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh oleh prosedur

⁷ Lihat dalam, Poedjosoedarmo, S, *Filsafat Bahasa*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).

⁸ Lihat pula dalam, P. Hardono Hadi. *Jatidiri Manusia: Berdasarkan Filsafat Organisme Whitehead*, (dalam bahasa Indonesia), (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 48-62.

kuantifikasi.⁹ Berdasarkan ini peneliti menekankan penggunaan non statistik (non matematis) dalam proses analisis data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori pengumpulan data merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain.¹⁰ Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹ Bila dilihat dari segi kebutuhan, maka peneliti menggunakan cara-cara pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentary*).

Analisa Data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis ini meliputi proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan.¹² Peneliti menggunakan langkah-langkah: *Pertama*, catatan lapangan (*field notes*) sebagai bahan mentah, akan direduksi dalam kategori sesuai tema. *Kedua*, hasil reduksi perlu disajikan secara tertentu untuk masing-masing kategori, fokus, tema yang hendak dimengerti. *Ketiga*, mengambil kesimpulan yang bermuara pada pelukisan yang komprehensif dan mendalam (*depth*).

3. TENTANG HEGEMONI, KEKUASAAN, DAN DEMOKRASI

Elaborasi judul yang diambil penulis bertumpu pada premis, bahwa pembaca akan bisa melakukan eksplorasi yang bersifat akademik (*academic exploration*), ketika pembaca sudah mempunyai pandangan yang sama terhadap terminologi yang digunakan penulis. Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan interpretasi penulis, maka penulis memulai dengan melakukan analisis semantik (*lughawi*) yang kemudian akan diperluas menuju ranah terminologis.

Hegemoni: Istilah ini berasal dari bahasa Yunani “eugemonia” yang berarti penguasaan. Awalnya, secara spesifik kata ini digunakan gereja pada lingkup penguasaan hirarkis antara kaum gereja. Tetapi sejalan dengan pencerahan

⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 15.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: PT Alfabeta, 2005), hlm. 62-63.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

¹² Sugiyono, *Memahami Pendekatan...*, hlm. 62-63

(*enlightenment*) yang melanda Eropa Barat, terminologi ini di pinjam oleh sarjana-sarjana ilmu politik untuk diartikan sebagai suatu invasi negara pada wilayah lain.¹³

Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hegemoni adalah pengaruh kekuasaan suatu negara atas bangsa lain (negara bagian).¹⁴

Kiai: Sebutan untuk orang yang memiliki keahlian (*have expertise*) di bidang ilmu-ilmu agama. Gelar ini bersifat antropologis yang dilekatkan oleh masyarakat tanpa imbalan (*given directly*)¹⁵ karena dinilai memiliki keluasan ilmu, kedalaman spiritual dan keagungan akhlak.

Demokrasi: Kata ini berasal dari “demos” yang berarti rakyat, dan “kratien” yang berarti pemerintahan. Kalimat bermakna pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat (*government of the people, government by the people, government for the people*).¹⁶

Pondok Pesantren: Kata pondok didefinisikan sebagai rumah untuk sementara.¹⁷ Sedangkan kata pesantren, dengan mendapat imbuhan Pe dan akhiran An, yang berarti tempat tinggal santri. Kata santri, menurut C.C. Berg, berasal dari bahasa Tamil yang diserap dari kata Shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu.¹⁸

Analisis: kata ini berasal dari bahasa Inggris “to analyze” yang berarti sesuatu sepotong-potong yang diamati bagian unsur-unsurnya.¹⁹ Istilah ini kemudian menjadi bagian dari instrumen penelitian ilmiah para akademisi.

Bahasa Tutur: Struktur ini terdiri dari dua kata, yaitu “bahasa” dan “tutur”. Perdebatan para ahli linguistik mengenai pengertian bahasa belum tuntas hingga kini. Ibn Jinni, pakar linguistik Arab klasik, mendefinisikan bahwa bahasa adalah

¹³ Nezar Patria, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 116.

¹⁴ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2016)

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, hlm. 29.

¹⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 764.

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, hlm. 12.

¹⁹ Jhon Enchols dan Hassan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), hlm. 28.

sebuah kata atau suara (*al-lafdz aw al-shaut*) yang digunakan oleh komunitas.²⁰ Sedangkan bahasa tutur dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bahasa lisan; yang menjadi bahan sebut-sebutan (pembicaraan) orang; buah mulut.²¹

Dalam konteks penelitian ini, terminologi hegemoni adalah ranah absolutisme kiai Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang, sedangkan demokrasi di sini lebih mengarah pada lumrahnya pemahaman (*basis of understanding*) para santri tentang demokrasi. Kiai yang dimaksud di sini adalah KH Yusqi Qosim (putra Pengasuh periode pertama) dan bahasa tutur adalah ungkapan atau instruksinya dalam beberapa kesempatan di pesantren itu. Adapun analisa yang dikehendaki di sini adalah hasil interpretasi penulis atas ungkapan-ungkapan kiai pesantren tersebut yang dipastikan memberi ruang besar adanya sisi validitas obyektif menjadi kabur akibat subyektifitas penulis.

Guna memperoleh data dan analisa yang valid, penulis menganggap perlu menggunakan metode yang relevan sebagai pendekatan berkaitan dengan tema kali ini.

Biografi Gramsci: Nama lengkapnya Antonio Gramsci (1891-1937) adalah filsuf, penulis dan teoritikus politik yang lahir di Ales, Italia. Gramsci yang sempat menjalani pemenjaraan pada masa rezim Fasis Benito Mussolini adalah pendiri dan pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Italia. Di samping dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis, ia juga dikenal sebagai penemu konsep hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme.²²

Konsep Hegemoni: Konsep ini merupakan kontribusi orisinal dan konsep kunci dalam pemikiran Gramsci. Konsep hegemoni ini secara kontekstual hadir karena menjawab dua pertanyaan: *Pertama*, mengapa terjadi kesenjangan antara teori Marxis dengan praktek dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya (*ploretariat class*). *Kedua*, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut. Dua pertanyaan ini disimpulkan dengan ujaran; sarana dan strategi apa yang mampu menghantar sebuah partai revolusioner

²⁰ Lihat dalam, Ibrahim Shabri Mahmud, *Sosiolinguistik*, (Cairo: Daarul Ma'rifah, 1995), hlm. 3.

²¹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*

²² Nezar Patria, *Antonio Gramsci: Negara...*, hlm. 100.

menumbuhkan dukungan mencapai kekuatan penuh dalam masyarakat kapitalisme yang telah melaju.²³

Teori hegemoni budaya Marxis, yang terkait khususnya dengan Antonio Gramsci, adalah gagasan bahwa kelas penguasa dapat memanipulasi sistem nilai dan adat istiadat masyarakat, sehingga pandangan mereka menjadi pandangan dunia (*weltanschauung*). Dalam kata lain, Gramsci biasanya menggunakan kata hegemoni untuk berarti cara dimana kekuasaan pemerintahan memenangkan persetujuan atas aturannya dari mereka yang ditaklukkan. Berbeda dengan pemerintahan otoriter, hegemoni budaya adalah hegemoni hanya jika mereka yang terkena dampaknya juga menyetujui dan memperjuangkan akal sehatnya.²⁴

Dalam pengertian kisaran zaman sekarang, hegemoni menunjukkan kepemimpinan sebuah negara tertentu, yang bukan hanya sebuah pengertian invasi negara-kota (*city-state*) terhadap nagara-negara (*the countries*), melainkan lebih luas dari itu, yaitu wujudnya bentuk negara pemimpin (*leader country*).

Selanjutnya Gramsci mempersyaratkan mengapa terjadi dan bagaimana proses terjadinya hegemoni dengan dua keniscayaan: Konsensus dan hegemonik-komprehensif.

Konsensus: Hegemoni yang dominan terhadap kelas yang dikuasai di bangun atas dasar konsensus melalui: *Pertama*, kompromi-kompromi yang ditempuh melalui unsur-unsur penekanan dan sisi-sisi intervensi. *Kedua*, kompromi-kompromi dilakukan oleh sebab keterbiasaan mengikuti cara-cara yang memiliki tujuan. *Ketiga*, kompromi-kompromi terwujud akibat tingkah laku yang bersumber dari tingkat kesadaran serta persetujuan semua elemen masyarakat.

Bahwa dalam tatanan sosial yang teratur harus ada dasar persetujuan (*substratum agreement*) yang kuat dan bisa melawan kekuatan-kekuatan yang menghancurkan serta muncul dari perbedaan-perbedaan kepentingan. Konsensus dalam arti ini

²³ <https://pakarkomunikasi.com/teori-hegemoni-dalam-komunikasi-massa>, diakses pada 3 Januari 2019

²⁴ Timothy Laurie, (2015), *Studi Maskulinitas dan Jargon Strategi: Hegemoni*, Tautologi, Sense. Lihat dalam, Angelaki: Jurnal Humaniora Teoritis. Diperoleh dari: <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp>

berada dalam hubungan dengan objek-objek tertentu, pribadi, kepercayaan nilai-nilai, lembaga-lembaga maupun yang lain.²⁵

Sementara dilihat dari derajat konsensus massa, terdapat tiga tingkatan hegemoni yang diungkap Gramsci, yakni: *Pertama*, hegemoni total (*integrated hegemony*) yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Rakyat tampak sangat patuh pada pemerintah dengan dukungan moral dan intelektual yang mewujudkan. *Kedua*, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*) yang ditandai dengan adanya tantangan berat atas dominasi dari kaum kapitalis modern yang memungkinkan potensi disintegrasi yang tersembunyi (bahaya laten). Meskipun tatanan politik berjalan normal, namun psikologi massa sudah tidak selaras dengan wacana yang dibangun oleh subjek hegemoni. *Ketiga*, hegemoni yang minimum (*minimal hegemony*). Hegemoni tingkat ketiga ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Pada tingkat ini kelompok hegemonik tidak sudi bersama dengan kepentingan dan aspirasi dari golongan atau kelas lain masyarakat.²⁶

Hegemonik-komprehensif: Negara yang bersifat hegemonik bukan hanya melakukan tekanan yang melibatkan angkatan bersenjata (*repressive-militeristik*), tetapi ketika cara-cara tersebut tumpul karena patriotisme kalangan masyarakat akar rumput (*grassroots community*), maka pengaruh budaya dan fikiran melalui sebuah medium wacana menjadi alternatif. Sehingga dengan begitu, negara tampil menggunakan pendekatan “merangkul”, bukan “memukul” (*non violence*) di dalam menghegemoni rakyat.

Hal yang membedakan antara Gramsci dengan tokoh lain tentang konsep hegemoni adalah: *Pertama*, Gramsci menerapkan konsep tersebut lebih luas bagi kekuatan tertinggi satu kelompok atau lebih atas lainnya dalam setiap hubungan sosial, sedangkan pemakaian istilah itu sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya. *Kedua*, Gramsci juga mempertajam karakter dalam istilah “pengaruh kultural”, tidak hanya sebagaimana dipahami oleh generasi sesudahnya yang mengklaim bahwa “kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi”.

Oleh sebab itulah, Muhadi menyebut bahwa urgensi teori hegemoni Gramsci terlelak pada kemampuannya menunjukkan krisis hegemoni pasca perang dunia

²⁵ Nezar Patria, *Antonio Gramsci...*, hlm. 110.

²⁶ *Ibid*, hlm. 125-129.

dan memberi penjelasan memadai bagaimana transformasi politik pasca perang. Bagi Muhadi, teori Gramsci ini lebih jitu ketimbang teori liberalisme, realisme, atau bahkan marxisme klasik dalam menjelaskan kejadian politik internasional pada kurun pasca perang dunia.²⁷ Bertolak dari sini, persoalan hegemoni nampaknya menjadi salah satu teori sosial yang paling relevan untuk mengetahui proses perang ideologi dalam percaturan global. Apalagi kemajuan teknologi informasi dan transformasi belakangan ini, menjadikan sekat-sekat negara akibat jarak dan batas waktu bukan sebuah kendala yang berarti. Akibatnya arus pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia mengalir deras ke seluruh sudut di dunia ini. Kondisi ini memungkinkan perebutan pengaruh antara satu kekuatan (baca: negara) terhadap kekuatan lainnya.

Dalam konteks wilayah kekuasaan seorang pengasuh pesantren, perspektif konsep Gramsci ini akan dipinjam penulis guna membedah tingkat intervensi kiai terhadap keberlangsungan dan bahkan pada perkembangan demokratisasi melalui ujaran-ujarannya.

Konteks kekuasaan, seperti penegasan Foucault bahwa pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari penguasa (negara); kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik individu atau kelas. Kekuasaan bersifat jaringan; menyebarluas ke mana-mana. Berpijak dari pendapat Michel Foucault tentang kekuasaan, maka bila pesantren diandaikan sebagai potret kecil sebuah negara (*miniature nation*) cukup absah. Oleh karena itu, penulis mencoba menyuling tingkat demokrasi dari relasi kuasa kiai pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang melalui perspektif tekstur ungkapan-ungkapannya.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum II didirikan pada tahun 1981 oleh KH Qosim Bukhori. Sedangkan peletakan batu pertama pembangunan pesantren ini dihadiri oleh para ulama dan beberapa unsur tokoh. Sementara donatur (waqif) pesantren ini adalah H Mahmuji. Ia menyumbangkan tanah untuk kepentingan pembangunan gedung pesantren seluas 1 hektar yang terletak sebelah timur Masjid Jamik desa Putukrejo.

²⁷ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 31.

Berdirinya pesantren tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan kiai Qosim Bukhori untuk ikut serta mengembangkan dan memperjuangkan nilai-nilai agama Islam. Sebab dilihat kondisi masyarakat desa Putukrejo yang masih terbelakang, baik di bidang pendidikan maupun sosial budaya, terutama dalam hal pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai agama.

Mendirikan SMP

Karena untuk mengantisipasi kecendrungan masyarakat yang berkeinginan agar putra-putrinya menjadi orang yang tidak saja faham ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan dan kepandaian terhadap ilmu umum, maka pada 1 Juli 1983 di pondok pesantren RU II dibuka pendidikan sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama). Proses pendidikan sekolah itu sendiri pada masa awal pembukaannya boleh dikata masih dalam kondisi darurat, karena ketika itu ruangan pendidikan belum dimiliki. Oleh sebab itulah sekolah SMP tersebut ditempatkan di ruang musholla pesantren.

Mendirikan Madrasah Diniyah

Di samping ada SMP RU pada pagi harinya, para santri diharuskan mengikuti Madrasah Diniyah pada sore hari. Pendidikan diniyah pada awalnya dimulai pada jam 15:00 WIB, kemudian diselingi istirahat untuk shalat Ashar, dan masuk kembali sesudah shalat selama satu jam. Sesuai dengan namanya, mata pelajarannya pun hanya terbatas pada pendalaman ilmu agama yang difokuskan pada pelajaran ilmu alat membaca kitab kuning (ilmu nahwu dan sharaf), sedikit ditambah ilmu fiqh.

Mendirikan SMA

Pada tahun 1984 pendidikan formal di lingkungan pesantren RU II ditambah dengan membuka SMA (Sekolah Menengah Atas) yang karena peraturan Departemen Diknas, maka kemudian hari berubah berganti nama menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum). Sebagai sekolah lanjutan dari SMP yang sudah dibuka terlebih dahulu, maka tentu saja siswa yang duduk pertama kali di kelas ini terdiri dari siswa SMP.

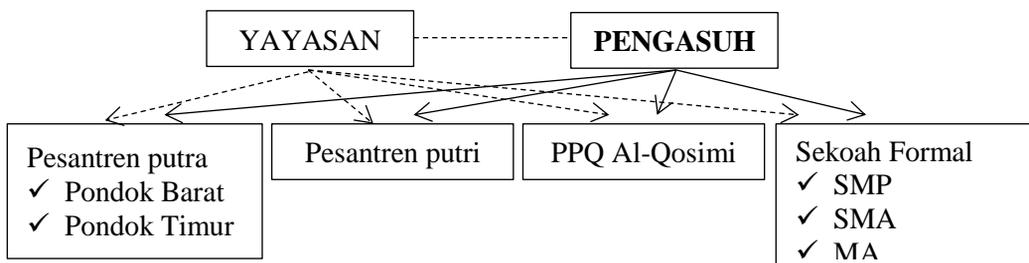
Membanjirnya santri dari berbagai tempat ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan tersebut. Antara lain, 1) Di dalam pondok pesantren RU II diadakan promosi besar-besaran tentang kondisi pendidikan pesantren RU II kepada masyarakat. Promosi ini dilakukan dengan cara, antara

lain mengirim para guru dan santri berbakat ke berbagai daerah yang menjadi tempat pengembangan Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh) yang diketuai oleh KH Qosim Bukhori. Pengiriman para guru dan santri berbakat ini tentu saja cukup menyentuh hati para penduduk desa setempat, karena disamping jalinan silaturahmi antar para guru dan warga bisa merekat, para santri berbakat juga mampu menampilkan acara-acara yang dapat menarik perhatian mereka. 2) Mayoritas para guru ketika itu bertempat tinggal di pesantren. Dengan keberadaan mereka berpusat di pesantren, menjadikan koordinasi antar guru semakin mudah dilakukan, dan komando-konsultatif dari kiai Qosim sebagai pengasuh juga tidak terhambat, maka permasalahan yang muncul baik di lingkungan pesantren ataupun di sekolah dapat tertangani dengan cepat. 3) Karena mayoritas para guru berada di pondok pesantren, maka semua program yang ada di pesantren maupun yang tersusun di sekolah menjadi sinergi. Orientasi dan program pendidikan antara kedua lembaga tersebut tidak saling tumpang-tindih.

Kepengasuhan

Semenjak KH Qosim Bukhori wafat pada tahun 2010, kepengasuhan secara otomatis jatuh kepada dua putra laki-lakinya, yaitu Gus Ja’farisshodiq dan Gus Yusqi Qosim. Tetapi karena Gus Faris (panggilan Gus Ja’farisshodiq) mangkat pada tahun 2017, maka praktis Pengasuh pesantren Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo berada di pundak Gus Yusqi.

Sebagai sosok yang dinobatkan sebagai Pengasuh pesantren yang memiliki berbagai unit pendidikan, kekuasaan hegemoni Gus Yusqi cukup luas melewati sekat satuan-satuan pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 ini. Jika digambarkan, hirarki hegemonik Pengasuh itu dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1: skema alur kewenangan Pengasuh dan Yayasan

Sekalipun telah ada Yayasan yang berfungsi menaungi unit-unit di lingkungan pesantren ini, namun ranahnya sebatas manajemen dan administrasi belaka. Sedangkan berbagai kebijakan-kebijakan vital tetap berada di tangan Pengasuh. Oleh karena itu, di dalam skema tersebut hubungan antara Pengasuh, Yayasan dan satuan unit-unit ditunjukkan dengan garis lurus dan garis putus-putus.

Struktur organisasi di dalam lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang sebagaimana dalam AD/ART Yayasan diuraikan bahwa garis lurus berarti komando instruktif sedangkan garis putus-putus artinya konsultatif.²⁸ Apabila merujuk pada ketentuan ini, maka diketemukan pengertian bahwa hirarki kekuasaan Pengasuh berada di atas satuan-satuan unit yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang.

Penjelasan tentang masing-masing posisi (*position element*) dalam struktur organisasi yang memperlihatkan bahwa kekuasaan di lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo itu diperkuat dengan ketentuan-ketentuan tentang Prinsip Umum dalam Bab III yang berbunyi:

Hirarki keputusan di lingkungan YPU dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, keputusan Pengasuh dan/atau Dewan Pengasuh. Kedua, keputusan Yayasan. Ketiga, keputusan rapat-rapat.

*Status keputusan-keputusan menjadi batal, apabila Pengasuh dan/atau Dewan Pengasuh menghendaki berbeda.*²⁹

Mencermati narasi yang terdapat AD/ART Yayasan, maka tampak sekali bahwa keberadaan Pengasuh sengaja didudukkan dalam posisi paling urgen sebagai pihak pengambil keputusan. Dalam ketentuan ini Pengasuh memiliki otoritas mutlak di atas keputusan-keputusan pihak lainnya. Entitas Pengasuh sebagai elemen pengambil keputusan hanya dipersandingkan dengan Dewan Pengasuh yang terdiri dari keluarga Pengasuh sendiri di mana status Dewan Pengasuh tampil kolektif.

Ruang yang luas ini jelas memungkinkan Pengasuh memerankan dominasi hegemonik begitu besar merajai komponen di bawahnya hingga melampaui sekat-

²⁸ Hal ini bisa dibaca dalam, ART Yayasan Pendidikan Usmani (YPU) Putukrejo Gondanglegi Malang, (tahun 2018), hlm. 2.

²⁹ Hal ini juga dapat dibaca dalam, ART Yayasan Pendidikan Usmani (YPU) Putukrejo Gondanglegi Malang, (tahun 2018). hlm. 6.

sekat kepentingan apapun. Hal demikian terbaca dari narasi setelahnya yang menggambarkan bahwa keputusan dalam bentuk apa saja, sekalipun diahentikan dari seleksi rapat, menjadi batal atas nama hak veto Pengasuh yang dipunyainya.

4.2. Analisis Data

Analisa bahasa Pengasuh dalam tulisan ini akan dibatasi pada dua aspek: 1) Hal yang bernuansa politis. 2) Hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan (*policy*) di dalam lingkup pesantren.

Bahasa Pengasuh Terkait Dengan Sikap Politik

Spektrum eskalasi politik di tahun 2019 yang dinilai oleh sebagian pengamat politik cukup memanas,³⁰ tidak saja berdampak pada masyarakat umum, namun juga merambah ke dunia pesantren. Sebagaimana syahwat politik para politisi yang menguap, geliat hasrat para kiai pesantren juga tergelitik untuk menggunakan posisi sebagai tokoh publik dibuat kendaraan melakukan transaksi politis (*political bargaining*) mengais kepentingan.

Demikian pula kondisi semacam ini mewarnai lingkungan pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo yang ditandai berbagai statemen Pengasuh menjelang kontestasi pemilihan umum. Tetapi ungkapan Pengasuh berkaitan dengan suhu politik hanya sebatas Pileg (Pemilihan Legislatif) daerah Kabupaten.

*“Kauleh ngarep, mayrakat Dapil 3 (Pagak, Donomulyo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur) mile Fulan... (nama caleg disamarkan). Karnah menabih kegiaden Khalwah (di PPRU 2) deddih donator, nyumbeng sapeh tellok, mun sampayan tak kerah.”*³¹

“Saya berharap, masyarakat Dapil 3 (Pagak, Donomulyo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur) memilih Fulan... (nama caleg disamarkan). Karena ketika kegiatan Khalwah (di Pesantren Raudlatul Ulum 2) menjadi donator, menyumbang tiga sapi. Sementara Anda tidak mungkin.”

³⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/suhu-politik-memanas-jelang-pemilu-2019-ini-pesan-wiranto.html>, diakses pada 7 Januari 2019

³¹ Hasil penuturan Kholilurrohmah, Ketua PP Raudlatul Ulum 2 Putukrejo 2019-2021. (03 Oktober 2019).

Jika dipilah ucapan Gus Yusqi tersebut dapat diambil tiga pokok pikiran: *Pertama*, harapan berupa ungkapan “*kauleh ngarep*”. *Kedua*, putusan pilihan calon yang diungkap dalam ujaran “*mile Fulan...*”. *Ketiga*, alasan yang melatarbelakangi anjuran beliau dengan kata-kata “*karnah... deddih donator*”.

Harapan itu diutarakan dihadapan jamaah kegiatan Khalwah yang menjadi agenda rutin pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo setiap awal bulan Rajab selama tiga hari tiga malam. Kegiatan yang digagas oleh KH Qosim Bukhori itu merupakan gerakan spiritual bertema tobat massal yang bersifat kolosal dengan peserta kisaran dua ribu jamaah thariqah dzikir Naqsyabandiyah an-Nahdliyah.

Memcermati klausa kata Pengasuh generasi kedua itu dengan bersandar pada konsep pemikiran Gramsci, maka sikap beliau di dalam ranah politik bisa digolongkan sebagai dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat. Status diri sebagai sosok yang menduduki determinan sebuah lokomotif kegiatan spiritual di tambah kultur masyarakat yang masih paternalistik dan orientasi kharisma tokoh, dimanfaatkan betul oleh Gus Yusqi Qosim guna meraup dukungan bagi pilihannya.

Dari sisi kosa kata, putra ketiga KH Qosim Bukhori memang tidak sedang memainkan instruksi mengikat (*mandatory instructions*) kepada para jamaahnya yang tergambar dari penggalan kata “*kauleh ngarep*” (saya berharap). Tentu hal ini tidak memiliki kaitan khusus dengan ungkapan “*mayrakat Dapil 3*” (masyarakat Dapil 3), sebab kata ini hanya sebuah identifikasi lokasi belaka. Namun kosa kata berikutnya, yaitu “*mile Fulan...*” (memilih Fulan...) merupakan inti dari imbauan yang mulai dimasukkan oleh Pengasuh ke dalam struktur kalimat ujarannya. Selanjutnya, “*karnah... deddih donator*” (karena... menjadi donator) menjadi kata yang mengindikasikan adanya penggiringan wacana (*guided discourse*).

Melihat klausul kata dalam struktur kalimat di atas, maka tampak sekali bahwa Gus Yusqi Qosim menampilkan dirinya sebagai seseorang yang menebarkan nilai-nilai liberalisasi di tengah-tengah publik. Hal ini terbukti dari tema besar dalam kalimat yang disampaikan hanya berbentuk harapan saja, bukan ujaran dengan model perintah. Sehingga dimungkinkan tersedianya ruang pilihan (*freedom of choice*) bagi jamaah. Adapun penggiringan wacana (*guided discourse*) di akhir kalimatnya, bisa dieksplorasi dari dua pendekatan: *Pertama*, sekalipun beliau berposisi sebagai pengganti abahnya dibidang dzikir tarekat (*Khalifah Mursyid al-Thariqoh an-Naqsyabandiyah*), tetapi sebagai manusia biasa tentu mempunyai kepentingan. Oleh sebab, kata-kata di akhir kalimatnya itu dapat dimaknai sebagai

landasan argumentatif agar seruannya lebih mencuri perhatian jamaah. *Kedua*, apa yang disebut di akhir-akhir ucapannya itu merupakan indikasi bahwa harapan beliau didasari oleh cara berfikir ilmiah di mana beliau ingin memperlihatkan bahwa lontaran harapan itu cukup beralasan.

Kalimat akhir itu pula sebetulnya kata kunci yang dapat disimpulkan sebagai latar motivasi Pengasuh melakukan pengarahan. Prihal geliat Gus Yusqi dalam kancah politik, penulis tidak sependapat dengan Greetz yang menyandangkan sebutan “*cultural broker*” (makelar budaya) di pundak kiai.³² Bagi penulis, apa yang dilakukan Gus Yusqi lebih pada sebuah upaya mendamaikan (*reapproachment*) kepentingan politis dan misi amar makruf nahi mungkar.

Namun menilik dari struktur kata yang diungkapkan dalam konteks gerakan beliau mengarahkan pilihan politik, sama sekali tidak terendus wujudnya langkah-langkah hegemonik secara masif pada jamaah. Pada titik ini, kesan yang tampak beliau cenderung mengambil sikap menyerahkan keputusan pilihan politis kepada khalayak. Sekalipun di dalam ucapan-ucapannya termuat nuansa penggalangan massa, namun hal itu memperlihatkan kata-kata sebatas anjuran belaka yang tidak memiliki implikasi dominasi kuat pada jamaah.

Bahasa Pengasuh Terkait Dengan Suksesi Ketua Pesantren

Berbeda dengan sikap Gus Yusqi Qosim di atas pelataran politik, perilaku beliau di dalam internal pesantren lebih mencerminkan sosok yang memiliki otoritas penuh sebagai seorang Pengasuh. Salah satu contoh yang dapat diangkat sebagai gambaran gaya kepemimpinan beliau ialah proses pergantian jajaran kepengurusan pesantren pada bulan Juli 2019 yang lalu. Setting ceritanya berupa dialog sebagaimana dikisahkan Kholilurrohmah (Lilur).³³

Gus Yusqi: “*Malam ini, saya menunjuk Lilur sebagai Ketua Pondok dan menarik Ustadz Nur Hafidz Romli ke jajaran Pengasuh.*”

³² Lihat Clifford Geertz dalam, Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 22.

³³ Hasil penuturan Kholilurrohmah, Ketua PP Raudlatul Ulum 2 Putukrejo 2019-2021. (16 Agustus 2019)

Lilur: “*Mohon maaf Kyai, alangkah lebih baik, jabatan itu untuk tahun depan.*”

Gus Yuzqi: “*Endak. Nunggu apa ? Ya sekarang aja.*”

Lilur: “*Saya masih banyak aktivitas, seperti PPL dan KKN. Saya takut gak ada di pondok selama pelaksanaan itu.*”

Gus Yuzqi: “*Ye mon bejene kuliye, ye Kuliye. KKN, ye mangkat.*” (Ya, jika waktunya, kuliah saja. Waktunya KKN, ya berangkat saja).

Dari konten perbincangan ini bisa di tarik benang merah bahwa sekalipun terjadi komunikasi dialogis, tetapi prosesnya hanya berjalan monologis. Kondisi ini dapat dimaklumi, sebab komunikasi dua arah tersebut sejatinya dalam situasi yang tidak berimbang (*unbalanced*) karena strata yang berbeda.

Bila dirunut rentetan dialog di atas, maka bisa diambil dua pokok pikiran: *Pertama*, perintah yang tampak dari ungkapan, “*saya menunjuk Lilur sebagai Ketua Pondok*”. *Kedua*, penutupan ruang tawar menawar (*bargaining position*) bagi santrinya lewat jawaban beliau, “*Ye mon bejene kuliye, ye Kuliye. KKN, ye mangkat.*” (Ya, jika waktunya, kuliah saja. Waktunya KKN, ya berangkat saja).

Dalam konteks suksesi Ketua Kepengurusan Pesantren, Gus Yusqi menggunakan cakar kewenangan untuk mencengkram struktur di bawahnya agar benar-benar terkuasai secara sempurna. Dalam perspektif konsep hegemoni Gramsci, secara mendasar manusia dikuasai bukan hanya oleh kekerasan dan paksaan dari atasan saja, melainkan juga oleh ide-ide yang berkembang di masyarakat.³⁴ Mungkin alinea ini terdengar simpel, tetapi implikasinya jauh lebih besar dari bayangan banyak orang. Untuk memahami kuasa hegemonik versi Gramsci, perlu difahami terlebih dahulu tiga istilah yang seringkali menyertainya, yaitu: 1) Ideologi (*common sense*), yaitu cara berpikir seseorang atau golongan. 2) Intektual organik, yaitu sebuah komunitas tanpa profesi tertentu tetapi mampu mendorong timbulnya suatu dinamika sosial. 3) Fungsionaris hegemoni masyarakat sipil (*civil society*), yaitu media untuk menanamkan pemahaman sehingga dapat dijadikan legitimasi kekuasaan.

Potret dominasi Pengasuh terhadap santri dalam konteks suksesi tersebut merupakan lanskap sebuah keinginan besar (*big dreams*), yakni terwujudnya garis

³⁴ Lihat dalam, <http://www.majalahganesha.id/gagalnya-hegemoni-kaderisasi/>, diakses pada 2 Agustus 2019

keberlangsungan kaderisasi. Apa yang dilakukan Gus Yusqi dengan komando instruksionalnya menegaskan sebuah gerakan revolusi kultural yang menjadi prasyarat lahirnya revolusi ideologi. Langkah ini lebih merupakan propaganda atas nama “Pengasuh” melalui legitimasi kuasa beliau supaya tercipta homogenitas setiap elemen di pesantren dengan cara mengekang intelktual organik.

Tetapi ketika ditelusuri melalui kaca mata Gramsci, fenomena bahasa dialog antara Gus Yusqi dan santrinya itu tidak sepenuhnya mencerminkan hegemoni versi penulis sekaligus teoritikus politik asal Italia itu.

Sebabnya adalah: Berbeda dengan kediktatoran, menurut Antonio Gramsci, hegemoni merupakan konsep kepemimpinan yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak dan kesadaran bersama yang menjadi alat legitimasi suatu kekuasaan sehingga suatu rezim bisa langgeng berkuasa tanpa adanya perlawanan.³⁵ Sedangkan penguasaan kiai muda itu diperoleh dengan cara kepemimpinan otoriter yang cenderung memasung mimbar bebas bagi level bawahnya.

Jika fenomena bahasa dialog tersebut dilakukan analisa analogis dengan teori tokoh penulis “Buku Catatan Penjara” (*Prison Notebooks*) itu, maka diketemukan gambaran sebagai berikut: Gramsci beranggapan bahwa negara terbentuk dari dua kombinasi, yaitu masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Bagi Gramsci, negara tidak hanya elitis-politis pemerintah beserta aparatus negaranya, namun juga memuat kultural non-formal masyarakat umum.

Apa yang diungkapkan Gramsci merupakan konteks tataran negara. Ketika konten ungkapan itu di tarik ke tingkat level kaderisasi pengurus pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo, maka sebetulnya tidak jauh berbeda. Elemen-elemen yang ada di dalam pesantren itu juga bisa diamati dari perspektif Gramsci. Tetapi kondisi keduanya tidak seratus persen sejurus, terdapat aspek berseberangan. Hal pokok dari dikhotomi dua keadaan ketika Gramsci menganggap bahwa hegemoni berbeda dengan kediktatoran. Hegemoni merupakan konsep kepemimpinan yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak dan kesadaran bersama yang menjadi

³⁵ Lihat dalam, Wazier, Ahmad. 2013. Konsep Hegemoni dalam Kebudayaan Modern. Diakses dari http://www.kompasiana.com/wajiran/konsep-hegemoni-dalam-kebudayaan-modern_5516da4ca33311847aba7d57, diakses pada 7 Agustus 2019

alat legitimasi suatu kekuasaan sehingga suatu rezim bisa langgeng berkuasa tanpa adanya perlawanan.³⁶

Apabila ditelisik secara cermat dalam konteks proses kaderisasi, langkah yang disiapkan oleh Gus Yusqi sebagai sosok yang duduk di “singgasana” Pengasuh mendominasi tahapan suksesi kepengurusan secara total menjadi titik kesamaan dengan konsep hegemoni versi seorang penyempurna teori kelas Marx itu. Letak persamaannya terdapat pada sisi ideologi Pengasuh yang memuat pesan-pesan bahwa kaderisasi harus dikedepankan dalam setiap proses-proses organisasi. Di samping itu, sebagai tokoh sentral di lingkungan pesantrennya, Gus Yusqi melepas sepenuhnya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan manajemen organisasi kepengurusan supaya dikembangkan sendiri oleh Ketua Pesantren tertunjuk.

Sikap ini mempertontonkan wujudnya semangat berdemokrasi (*the spirit of democracy*) yang komprehensif. Perilaku Pengasuh yang demokratis seperti itu dikatakan “komprehensif”, karena membuka ruang luas bagi santri senior, termasuk Ketua Pengurus tertunjuk, untuk menata stuktur organisasi yang dinilai mendesak untuk kebutuhan pesantren, untuk ejawantah emansipasi seluruh potensi yang dimiliki santri senior agar terlibat di dalam merangkai unsur-unsur personal agar tertata dalam bangunan organisasi kepengurusan yang mapan dan untuk memperkuat ikhtiar mendewasakan santri, khususnya santri senior yang diancang sebagai anggota kepengurusan.

Namun, pada aspek kepemimpinan diktator yang diakoni Gus Yusqi, terdapat jurang pemisah dengan hegemoni yang diandaikan Gramsci sebagai dominasi kuasa hasil dari proses dialektis dan kesepemahaman dua belah pihak. Eksistensi Gus Yusqi sebagai Pengasuh benar-benar mencerminkan adanya sosok yang dipandang sebagai tokoh sentral di dalam komunitas pesantrennya. Kondisi semacam ini lumrah terjadi di kalangan mayoritas pesantren yang acap kali menempatkan kiai-nya sebagai rujukan utama (*the main character*) dalam setiap aspek proses-proses perkembangan atau perubahan, baik berkaitan dengan santri maupun pesantren.

Terkait dengan kebutuhan santri, terkadang kiai memberikan arahan tentang masa depan menyangkut prospek di masa yang akan datang, hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi ataupun keberlangsungan santri itu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itulah, tidak jarang peristiwa kepulangan santri (baca;

³⁶ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Insist, 1999), hlm. 19-20.

boyong) misalnya, terhenti oleh sebuah instruksi kiai. Sedangkan terkait dengan kepentingan pesantren, biasanya kiai menyodorkan prinsip-prinsip pokok (*main basis*) yang harus dijadikan pijakan rekonstruksi program-program pesantren. Sekalipun prinsip-prinsip pokok (*main basis*), kadangkala harus diinstruksikan hingga menghegemonik seluruh santri, terutama para santri senior yang kemudian disiapkan menjadi anggota kepengurusan.

Gus Yusqi sebagai Pengasuh yang tampil otoriter sedemikian rupa merupakan keniscayaan yang harus diamini oleh setiap orang di dalam lingkungan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang. Sebab arah pendidikan dan prinsip-prinsip program yang disimbolkan sebagai visi dan misi pesantren sepatutnya ada agar semua detail kegiatan bertolak dari arah dan prinsip-prinsip itu. Dalam ranah ini rupanya Pengasuh melibatkan diri secara intens pada setiap tahapan-tahapan dan proses-proses mewujudkannya. Peran aktif Pengasuh seperti ini memberi kesan bahwa tujuan merupakan hal prinsipil yang harus ditancapkan terlebih dahulu sebelum mengembangkan postulat-postulat berikutnya sehingga arah pendidikan dan prinsip-prinsip program yang disimbolkan sebagai visi dan misi pesantren itu benar-benar dibuat landasan pacu menyusun kegiatan yang mengarah pada visi dan misi tersebut.

Model kepemimpinan alumni Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo yang cenderung otoriter itu diperkuat oleh ucapannya sendiri di depan para pengurus pesantren:

“Santri harus patuh pada kiai. Kiai yang punya instruksi, santri ya taat pada perintah itu.”³⁷

Ucapan ini mengindikasikan bahwa cakupan kekuasaan Pengasuh melintasi batas apa saja di tengah-tengah lingkaran santri, termasuk struktur organisasi kepengurusan. Lebih-lebih menyangkut persoalan Ketua Pesantren yang dianggap sebagai sosok yang menahkodai proses manajerial kepengurusan, maka berdasarkan arah ujaran Gus Yusqi tersebut menegaskan bahwa hegemoni Pengasuh cukup urgen untuk diterapkan secara tegas.

Dalam ranah ini, tidak ditemukan ruang dan celah *ijtihadi* bagi segenap santri yang memungkinkan sebuah suksesi Ketua Pengurus bisa diselenggarakan dengan

³⁷ Hasil penuturan Farisi Baidlowi, anggota Devisi Keamanan PP Raudlatul Ulum 2 Putukrejo 2019-2021. (03 Oktober 2019).

cara demokratis yang memfasilitasi keterwakilan aspirasi setiap santri melalui seleksi pemilu (*general choice*). Perlakuan Pengasuh mengekang santri, khususnya santri senior, terhadap proses demokratisasi bukan berarti sama sekali Pengasuh tidak mengakomodir ide dan gagasan, buktinya Gus Yusqi hanya mengintervensi pada aspek pergantian struktur Ketua Pesantren saja. Hal ini dilakukan karena persoalan suksesi Ketua Pesantren merupakan bagian dari perkara yang prinsip di dalam pesantren, sebab di tangan seorang Ketua Pesantren sebagian besar program-program kepesantren dikendalikan. Dalam pandangan Pengasuh, tingkat urgensi Ketua Pesantren yang demikian sentral dalam hal menentukan seberapa jauh perkembangan dan peningkatan mutu pesantren, maka bagi Pengasuh kursi Ketua Pesantren itu harus diduduki oleh profil yang tepat sesuai kadar integritas, kredibilitas dan tentu saja loyalitas kepada pesantren. Menemukan sosok yang persis seperti harapan Pengasuh akan menghadapi kesulitan jika dengan serta merta diserahkan sepenuhnya kepada segenap santri. Dinamika ide yang beragam setiap personal masing-masing santri membuat pemilahan Ketua Pesantren yang ideal sebagaimana asa Pengasuh terlampaui melangit, apalagi bila forum pilihannya berbentuk sangat terbuka yang memungkinkan munculnya suasana tidak serius. Oleh karenanya, alih kendali oleh Gus Yusqi merupakan langkah tepat sekalipun bersifat hegemonik dan cenderung menutup celah demokratisasi.

Adapun ranah detail program yang menjadi penjabaran visi dan misi dialihkan sepenuhnya kepada kepengurusan pesantren supaya digarap dan diorganisir secara matang. Sistem delegasi yang dilakukan Pengasuh demikian ini dapat dimaknai sebagai proses pendewasaan dan langkah-langkah mempersiapkan generasi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tangguh nantinya. Secara implisit, elastisitas Gus Yusqi ini merupakan angin surga bagi para santri senior (baca: kepengurusan) supaya mereka termotivasi melakukan eksplorasi terhadap potensi diri, baik dalam bentuk tugas-tugas individu (*individual tasks*) maupun kerja-kerja kolektif (*group work*). Kebebasan yang diberikan oleh Pengasuh dalam rangka pengembangan ini tentu merupakan bagian keluasan pandangan profil seorang Pengasuh yang dapat memandang bahwa fakta masa depan yang cenderung pluralistik dan kompleks. Implementasi pengembangan diri para santri, utamanya santri senior yang tergabung dalam institusi kepengurusan, terwadahi dalam berbagai macam variasi kegiatan pesantren yang disusun dan diprogramkan.

Demikian pula mengenai persoalan struktur personalia organisasi kepengurusan pesantren perlu dipilah sisi utama dan aspek-aspek yang menjadi pendukung organisasi tersebut. Ketika identifikasi sudah ditemukan dalam konteks kepengurusan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo, maka sisi utama

inilah yang dipandang perlu gaya kepemimpinan diktator sebagaimana diurai di atas. Adapun model struktur pengurus melalui rekrutmen dan reposisi personalia kepengurusan yang dianggap sesuai keterampilan masing-masing individu adalah wilayah yang dapat dikembangkan oleh para santri senior.

Pada dua sisi berbeda; *pertama*, ranah arah pendidikan dan prinsip-prinsip program yang disimbolkan sebagai visi dan misi, *kedua*, ranah detail program yang menjadi penjabaran visi dan misi, ditemukan dua gaya kepemimpinan berbeda pada diri Gus Yusqi, sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang. Dalam suatu waktu ia akan tampil sebagai Pengasuh yang diktator dengan otoritas mutlak, tetapi dalam suatu waktu yang lain Gus Yusqi bakal kelihatan sebagai Pengasuh yang demokratis.

5. KESIMPULAN

Melihat uraian di atas, ujaran-ujaran Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang memperlihatkan sikap-sikap yang dapat disimpulkan:

- 1) Di dalam ranah politik, eksistensi Pengasuh sebagai tokoh tarekat cukup demokratis membuka ruang pilihan tanpa hegemoni pada jamaahnya.
 - 2) Di dalam lingkungan pesantren, terdapat dominasi kuasa Pengasuh yang mengintervensi proses suksesi Ketua Pengurus, tetapi membuka kran demokratisasi pada sisi pengembangan manajemen organisasi. []
-

REFERENCES

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Baso, Ahmad. 2000. *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- _____. 2006. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bruinessen, Martin Van. 1998. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Mizan.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren, Sebuah Penelitian Authobiography Kiai*, Jakarta: LP3M.
- Enchols, Jhon dan Hassan Sadili. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Hadi, P. Hardono. 1996. *Jati Diri Manusia: Berdasarkan Filsafat Organisme Whitehead*, (dalam bahasa Indonesia), Yogyakarta: Kanisius.
- Madjid, Nurcholish. 2010. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: PT. Dian Raktyat.
- Mahmoud, Ibrahim Shabri. 1995. *Sosiolinguistik*, Cairo: Daarul Ma'rifah.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Patria, Nizar. 1999. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poedjosoedarmo, S. 2001. *Filsafat Bahasa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsc*. Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, Yogyakarta: Insist.
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Pendekatan Kualitatif*, Bandung: PT Alfabeta.
- <https://pakarkomunikasi.com/teori-hegemoni-dalam-komunikasi-massa> (diakses, 7 Agustus 2019).
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/suhu-politik-memanas-jelang-pemilu-2019-ini-pesan-wiranto.html> (diakses, 7 Agustus 2019).
- <http://www.majalahganesha.id/gagalnya-hegemoni-kaderisasi/> (diakses, 7 Agustus 2019).
- Laurie, Timothy. 2015. *Studi Maskulinitas dan Jargon Strategi: Hegemoni, Tautologi, Sense*. Lihat dalam, Angelaki: Jurnal Humaniora Teoritis. Diperoleh dari: <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp> (diakses, 01 Oktober 2019).
- Wazier, Ahmad. 2013. Konsep Hegemoni dalam Kebudayaan Modern. Diakses dari http://www.kompasiana.com/wajiran/konsep-hegemoni-dalam-kebudayaan-modern_5516da4ca33311847aba7d57 (diakses, 7 Agustus 2019).